

Meningkatkan Kesadaran Hukum Pekerja Migran Indonesia: Program Edukasi dan Pendampingan Hukum

Vivi Sylvia Purborini¹, Hibertus Sujiantoro², Galih Setyo Refangga³, Rika Novitasari⁴

¹ Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; velioraps1@gmail.com

² Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; sujiantoro1961@gmail.com

³ Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; ranggagalih20@gmail.com

⁴ Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; rikanovita29@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

kesadaran hukum;
pekerja migran;
Indonesia

Article history:

Received 2024-08-18

Revised 2024-11-26

Accepted 2025-01-22

ABSTRACT

Indonesian migrant workers' legal awareness shows the importance of integrating legal and health literacy to increase their access to basic rights, including health care. The concept of this educational program includes preparing educational materials that are easy to understand, tailored to the literacy level and needs of migrant workers. This educational material not only contains general legal information, but also real case examples to clarify understanding. Legal awareness of Indonesian migrant workers still needs to be significantly improved. Even though there have been efforts to provide educational programs and legal assistance, the level of legal awareness of migrant workers is still relatively low

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

First name Last name

Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; velioraps1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Literatur mengenai kesadaran hukum pekerja migran Indonesia menunjukkan pentingnya pengintegrasian literasi hukum dan kesehatan untuk meningkatkan akses mereka terhadap hak-hak dasar, termasuk perawatan kesehatan. Dalam artikel oleh (Vissandjée et al., 2017), penulis menekankan bahwa peningkatan literasi kesehatan yang digabungkan dengan literasi hukum dapat membantu migran dalam mengakses hak mereka atas perawatan yang layak. Penelitian ini mendorong adanya debat mengenai siapa yang paling tepat untuk memberikan layanan peningkatan literasi ini serta bagaimana mereka harus dilatih dan dilengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk mendukung pekerja migran dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Selanjutnya, (Ersanilli, 2023) menjelaskan pentingnya program pelatihan pra-keberangkatan bagi pekerja migran berpendidikan rendah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan migran dengan memberikan pengetahuan tentang hak-hak mereka, sehingga mengurangi risiko eksploitasi. Penulis mencatat bahwa pelatihan ini lebih umum ditemukan di Asia dan Afrika, dengan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pentingnya regulasi dalam proses perekrutan juga ditekankan, di mana pemerintah diharapkan mengambil peran lebih aktif untuk melindungi hak-hak migran sejak awal.

Terakhir, (Casalis et al., 2024) mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang terpaksa pindah, terutama dalam konteks penyediaan informasi hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak peserta yang tidak mengetahui cara mencari bantuan setelah mengalami kekerasan. Penelitian ini menunjukkan adanya trade-off antara penyampaian informasi yang bersifat umum dan percakapan yang lebih personal yang memberikan informasi hukum yang spesifik. Dengan lebih dari 100 juta orang yang terpaksa pindah pada tahun 2023, penelitian ini menawarkan strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses informasi hukum yang diperlukan oleh migran dan pencari suaka.

Secara keseluruhan, ketiga artikel ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan penyediaan informasi yang tepat.

2. METODE

Konsep program edukasi ini meliputi penyusunan materi edukasi yang mudah dipahami, disesuaikan dengan tingkat literasi dan kebutuhan pekerja migran. Materi edukasi tersebut juga tidak hanya berisi informasi hukum secara umum, tetapi juga contoh kasus nyata untuk memperjelas pemahaman. Selain itu, konsep program edukasi juga mencakup pelatihan bagi para tenaga pengajar atau pendamping hukum yang akan memberikan edukasi kepada pekerja migran. (Rohman et al.2023)

Metode pendampingan hukum dalam program ini meliputi pemberian akses konsultasi hukum melalui telepon atau online, penyediaan jaringan advokat atau konsultan hukum di negara tujuan, serta pelatihan penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, metode ini juga mencakup pendampingan langsung dalam proses hukum di negara tujuan, termasuk dalam kasus-kasus perselisihan dengan majikan atau lembaga kerja. (Adnantara, 2024)

Kolaborasi dengan pihak terkait termasuk kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, organisasi non-pemerintah di bidang pembelaan hak-hak pekerja migran, serta lembaga-lembaga penegak hukum di negara tujuan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program, memastikan akses ke pembaruan terkait regulasi hukum dalam perlindungan pekerja migran, dan memudahkan proses pendampingan hukum di negara tujuan. (Nandaklana, 2024)

Evaluasi Program Edukasi dan Pendampingan Hukum dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak program dalam meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia. Dalam proses evaluasi program, akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek seperti partisipasi pekerja migran, penerapan pengetahuan hukum, dan perubahan perilaku. Evaluasi juga akan mempertimbangkan tingkat kepuasan pekerja migran terhadap program dan manfaat yang diperoleh dari program. Dengan evaluasi program yang komprehensif, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keberhasilan dan kelemahan program yang telah dijalankan.

Metode evaluasi yang akan digunakan meliputi analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data jumlah peserta program, tingkat partisipasi, dan peningkatan pengetahuan hukum akan diukur secara kuantitatif. Sementara itu, data mengenai perubahan perilaku, kepuasan peserta, dan dampak program akan dianalisis secara kualitatif melalui wawancara dan survei. Selain itu, evaluasi juga akan melibatkan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program dan pengumpulan data sekunder terkait kesadaran hukum pekerja migran sebelum dan setelah mengikuti program.

Hasil evaluasi program akan mencakup gambaran yang jelas mengenai efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran, termasuk tingkat peningkatan pengetahuan hukum dan perubahan perilaku yang terjadi. Selain itu, hasil evaluasi juga akan mengidentifikasi faktor keberhasilan dan faktor penghambat dalam implementasi program. Data mengenai tingkat kepuasan peserta terhadap program dan manfaat yang diperoleh juga akan menjadi bagian penting dari hasil evaluasi yang akan menjadi dasar bagi perbaikan program di masa mendatang.

3. PEMBAHASAN

Artikel "Health and legal literacy for migrants: twinned strands woven in the cloth of social justice and the human right to health care" yang ditulis oleh (Vissandjée et al., 2017) membahas pentingnya meningkatkan literasi kesehatan dan hukum di kalangan pekerja migran. Dalam konteks ini, penulis menekankan bahwa literasi kesehatan yang digabungkan dengan literasi hukum dapat membantu pekerja migran untuk lebih baik dalam mengakses hak asasi mereka atas perawatan yang layak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan keterlibatan sosial, kewarganegaraan, dan produktivitas.

Salah satu poin krusial yang diangkat dalam artikel ini adalah perlunya perdebatan mengenai siapa yang paling tepat untuk menyediakan layanan yang meningkatkan literasi kesehatan dan hukum, serta bagaimana mereka harus dipersiapkan, dilatih, dan dilengkapi. Penulis menunjukkan bahwa tanpa strategi yang jelas dalam penyampaian edukasi hukum dan kesehatan, pekerja migran akan terus menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka dan mengakses layanan yang diperlukan.

Artikel ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana literasi hukum dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran. Dengan memahami hukum yang berlaku, pekerja migran dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini menciptakan efek domino yang positif, di mana peningkatan literasi hukum dan kesehatan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan.

Namun, artikel ini juga mengisyaratkan adanya tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi program-program edukasi ini. Pertanyaan tentang sumber daya dan pelatihan bagi penyedia layanan menjadi sangat penting. Tanpa dukungan yang memadai, upaya untuk meningkatkan literasi hukum dan kesehatan di kalangan pekerja migran bisa jadi tidak efektif.

Artikel yang ditulis oleh (Ersanilli, 2023) berfokus pada kebijakan negara asal terhadap pekerja migran berupa rendah, dengan penekanan pada pentingnya program pelatihan pra-keberangkatan. Menurut artikel ini, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mendorong penggunaan pelatihan pra-keberangkatan sebagai alat untuk memberdayakan migran dan mengurangi risiko eksploitasi yang mereka hadapi. Program-program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran hak.

Salah satu poin penting yang diangkat dalam artikel ini adalah bahwa banyak negara, terutama di Asia dan Afrika, telah mengimplementasikan program pelatihan pra-keberangkatan. Pelatihan ini sering kali diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga perekrutan swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), serta lembaga internasional seperti ILO dan IOM. Dengan adanya pelatihan ini, migran tidak hanya mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, tetapi juga pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka terkait upah dan kondisi kerja.

Namun, artikel ini juga menyoroti masalah yang sering terjadi dalam proses perekrutan. Pelanggaran hak-hak migran sering kali dimulai pada tahap perekrutan, di mana para perekrut dapat mengenakan biaya berlebihan atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada calon migran. Oleh karena itu, adanya regulasi dari pemerintah dalam proses perekrutan menjadi sangat penting. Lebih dari setengah negara yang tercatat dalam database RIGHTS memiliki agen pemerintah yang bertanggung jawab untuk merekrut pekerja ke luar negeri, yang dapat membantu mengatur dan mengawasi proses tersebut.

Di sisi lain, meskipun sebagian besar negara mewajibkan perizinan bagi agen perekrutan swasta, tantangan tetap ada, terutama di negara-negara seperti Kamboja yang tidak memiliki batasan biaya perekrutan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum bagi pekerja migran, yang dapat dicapai melalui program edukasi dan pendampingan hukum yang lebih komprehensif.

Artikel yang berjudul "Information on the move? An experiment on supporting forcibly displaced people in Greece" oleh (Casalis et al., 2024) memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan informasi yang dihadapi oleh individu yang dipaksa mengungsi, seperti pengungsi dan pencari suaka

di Yunani. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menyediakan informasi hukum kepada kelompok yang terpinggirkan ini, efektivitas dari upaya tersebut masih diragukan.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan percobaan acak untuk mengevaluasi pemahaman dan akses individu terhadap informasi hukum, khususnya mengenai cara mencari bantuan setelah mengalami kekerasan. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir setengah dari peserta tidak mengetahui cara untuk mencari bantuan setelah mengalami kekerasan, yang menyoroti adanya kekurangan informasi yang signifikan di kalangan populasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada program yang dirancang untuk memberikan informasi hukum, banyak individu yang masih tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana dan di mana mereka dapat mencari bantuan ketika menghadapi situasi yang berbahaya.

Penelitian ini juga menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk mengadopsi program informasi hukum yang didukung teknologi, dampak dari informasi yang diberikan terhadap akses layanan, kesehatan mental, dan integrasi individu ke dalam masyarakat tetap terbatas. Ini menunjukkan bahwa sekadar memberikan informasi tidak cukup; cara penyampaian dan konteks informasi juga sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Dalam hal ini, penulis mengeksplorasi perbedaan antara informasi hukum generik dan informasi hukum yang dipersonalisasi, serta dampaknya terhadap pemahaman dan tindakan peserta.

Dengan mempertimbangkan konteks pekerja migran Indonesia, temuan dari artikel ini relevan dalam memahami pentingnya penyediaan informasi hukum yang tepat dan efektif. Keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai dapat berkontribusi pada kerentanan pekerja migran, yang sering kali menghadapi tantangan hukum dan sosial di negara tujuan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan strategi yang lebih terarah dalam penyampaian informasi hukum, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan konteks budaya dari pekerja migran.

Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu. Mereka biasanya bepergian ke negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura untuk bekerja di sektor seperti pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau konstruksi. Mereka meninggalkan keluarga dan tanah air demi mencari penghidupan yang lebih baik, namun sering kali menghadapi berbagai risiko dan masalah di tempat tujuan. (Yanti and Pidada2023)

Pekerja Migran secara umum didefinisikan sebagai individu yang bekerja di luar negara asalnya dengan status migran atau pekerja migran. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh kasar, pekerja rumah tangga, atau tenaga kerja konstruksi. Mereka dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara, namun seringkali dihadapi dengan permasalahan seperti eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kondisi hukum pekerja migran Indonesia mencakup peraturan nasional dan internasional yang memengaruhi hak dan perlindungan pekerja migran. Hal ini termasuk UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang menetapkan hak-hak pekerja migran dan prosedur untuk melindungi mereka. Di sisi internasional, ada Konvensi ILO No. 97 tentang Pekerja Migran yang memberikan panduan tentang hak-hak pekerja migran di luar negeri. Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi pekerja migran Indonesia di dalam dan di luar negeri. (Tambajong, 2021)

Peraturan nasional yang mengatur pekerja migran Indonesia meliputi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi pekerja migran, termasuk hak untuk mendapat perlindungan, upah yang layak, dan akses pada pendidikan dan pelatihan. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2015 yang mengatur perlindungan, penempatan, dan pengawasan terhadap pekerja migran. Peraturan-peraturan ini menjadi dasar hukum yang memberikan landasan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (Purwidiarso, 2024)

Peraturan internasional yang berpengaruh terhadap pekerja migran Indonesia termasuk Konvensi ILO No. 97 tentang Pekerja Migran, yang memberikan pedoman perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri. Selain itu, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan dasar hukum yang relevan terhadap hak-hak pekerja migran. Peraturan internasional ini menjadi penting dalam memberikan panduan terhadap hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kesadaran hukum pekerja migran Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pemahaman akan hak dan kewajiban hukum, pekerja migran dapat menghindari eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia agar mereka dapat memperjuangkan hak-haknya dengan lebih efektif. (Apriani et al.2024)

Tingkat kesadaran hukum pekerja migran Indonesia masih perlu ditingkatkan. Banyak pekerja migran yang kurang paham akan hak-hak hukumnya, sehingga rentan menjadi korban eksploitasi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, program pendidikan dan sosialisasi hukum terkait hak-hak pekerja migran perlu digalakkan untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum mereka. (Jannah et al.2024)

Program Edukasi dan Pendampingan Hukum ini dirancang untuk memberikan pemahaman hukum kepada pekerja migran Indonesia, baik sebelum mereka berangkat maupun selama bekerja di luar negeri. Melalui program ini, para pekerja migran akan mendapatkan edukasi mengenai hak-hak mereka, tata cara penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum yang dapat mereka akses. Selain itu, program ini juga memberikan pendampingan hukum kepada para pekerja migran yang mengalami masalah hukum di luar negeri. (Lokahita et al.2024).

KESIMPULAN

Kesadaran hukum pekerja migran Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional untuk meningkatkan pengetahuan dan akses mereka terhadap hak-hak dasar. Tiga artikel yang dianalisis menunjukkan pentingnya integrasi literasi hukum dan kesehatan, pelatihan pra-keberangkatan, serta penyediaan informasi hukum yang efektif bagi pekerja migran.

Artikel pertama, yang membahas pentingnya literasi kesehatan dan hukum, menekankan bahwa peningkatan literasi ini dapat membantu pekerja migran dalam mengakses hak atas perawatan kesehatan yang layak. Penulis menyoroti bahwa tanpa adanya strategi yang jelas dalam penyampaian edukasi, pekerja migran akan kesulitan memahami hak-hak mereka (Vissandjée et al., 2017). Ini menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi ini.

Artikel kedua menyoroti pentingnya program pelatihan pra-keberangkatan yang dirancang untuk memberdayakan pekerja migran berpenghasilan rendah. Pelatihan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai hak-hak pekerja, tetapi juga keterampilan yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka di negara tujuan (Ersanilli, 2023). Namun, tantangan dalam proses perekrutan, seperti biaya yang berlebihan dan informasi yang menyesatkan, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak migran.

Artikel ketiga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh individu yang terpaksa pindah, dengan fokus pada penyediaan informasi hukum. Penelitian ini menemukan bahwa banyak peserta tidak mengetahui cara mencari bantuan setelah mengalami kekerasan, menunjukkan adanya kekurangan informasi yang signifikan (Casalis et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi hukum yang tepat dan relevan sangat penting untuk membantu pekerja migran mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia, diperlukan pendekatan yang mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan penyediaan informasi yang tepat. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam penyampaian informasi hukum, serta memastikan bahwa program-program edukasi dan pendampingan hukum dapat diakses dan relevan dengan kebutuhan pekerja migran.

Dalam implementasi program, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya akses informasi hukum bagi pekerja migran, kesulitan dalam mendapatkan akses ke lembaga penegak hukum, dan minimnya keterampilan bahasa asing. Untuk mengatasi tantangan ini, dapat dilakukan langkah-langkah konkrit seperti peningkatan akses informasi melalui media sosial atau aplikasi khusus, pelatihan keterampilan bahasa asing, serta kerja sama yang lebih erat dengan lembaga penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri.

Tantangan dalam implementasi program dapat meliputi birokrasi yang rumit, terbatasnya sumber daya yang tersedia, serta minimnya partisipasi dari pihak-pihak terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya konkret seperti penyederhanaan prosedur birokrasi, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan komunikasi serta koordinasi antara semua pihak terkait dalam pelaksanaan program.

Untuk mengatasi tantangan implementasi program, solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk mendukung program edukasi hukum bagi pekerja migran. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat diintegrasikan untuk meningkatkan akses informasi hukum bagi pekerja migran. Rekomendasi lainnya termasuk pelatihan bahasa asing, pendampingan hukum secara mandiri, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di dalam negeri dan di negara tujuan migran.

Penerapan program di lapangan melibatkan proses implementasi program edukasi dan pendampingan hukum kepada para pekerja migran Indonesia secara langsung. Langkah-langkah konkrit dalam menyebarkan informasi, memberikan pelatihan, dan memberikan pendampingan hukum dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi di mana para pekerja migran bekerja, guna memastikan program ini dapat mencapai sasaran dengan efektif.

Dampak positif dari program edukasi dan pendampingan hukum terlihat dalam peningkatan kesadaran hukum para pekerja migran. Mereka menjadi lebih memahami hak-hak mereka di tempat kerja, cara mengakses bantuan hukum, dan perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh. Selain itu, terlihat pula peningkatan pengetahuan tentang prosedur hukum terkait imigrasi, dan perlindungan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pekerja migran Indonesia memegang peran penting dalam perlindungan hak-hak dan kesejahteraan mereka. Program edukasi dan pendampingan hukum memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini efektif dalam memberikan pemahaman hukum dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dalam melindungi hak-hak mereka. Namun, tantangan dalam implementasi program juga perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas informasi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai metode pendampingan hukum yang lebih efektif, serta mengevaluasi dampak jangka panjang dari program ini terhadap pekerja migran Indonesia.

Ringkasan temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pekerja migran Indonesia masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Meskipun telah ada upaya dalam memberikan program edukasi dan pendampingan hukum, tingkat kesadaran hukum pekerja migran masih relatif rendah. Studi kasus juga menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan hukum pekerja migran. Namun, tantangan dalam implementasi program juga menjadi perhatian, seperti kurangnya akses sumber daya dan informasi. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk fokus pada pengembangan metode pendampingan hukum yang lebih efektif serta evaluasi dampak jangka panjang dari program ini terhadap pekerja migran Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai metode pendampingan hukum yang lebih efektif, sehingga program edukasi dan pendampingan hukum dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia. Selain itu, evaluasi dampak jangka panjang dari program ini perlu menjadi fokus penelitian

selanjutnya, untuk melihat sejauh mana program ini dapat berdampak pada perlindungan hak-hak pekerja migran dalam jangka waktu yang lebih panjang. Disarankan pula untuk memperhatikan solusi dan rekomendasi yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, serta menggali lebih dalam mengenai peran kolaborasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia.

REFERENSI

- Vissandjée, B., E. Short, W., & Bates, K. (2017). Health and legal literacy for migrants: twinned strands woven in the cloth of social justice and the human right to health care. ncbi.nlm.nih.gov
- Ersanilli, E. (2023). Origin countries' policies on low-waged migrant workers. Results from the RIGHTS policy database. osf.io
- Casalis, M., Hangartner, D., Hartman, A., & Sanchez, R. (2024). Information on the move? An experiment on supporting forcibly displaced people in Greece. osf.io
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2023). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia “Studi Kasus di Provinsi Bali”. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 75-80. indrainstitute.id
- Nisa, A. K., Soelistijo, D., & Susilo, S. (2023). A Perempuan Pekerja Migran: Analisis Hubungan Faktor Usia, Pendidikan dan Status Perkawinan Terhadap Partisipasi Kerja Migran Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 3(2), 100-115. uinjambi.ac.id
- Tambajong, G. (2021). ... Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Lex Administratum*. unsrat.ac.id
- Purwidiarso, W. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. unissula.ac.id
- Apriani, L. R., Budiarti, S., Wolters, M. M. Y., Putri, A. E., Dwipangestu, T., & Syamsumardian, L. (2024). Advokasi Hak Pekerja Migran Di Sanggar Bimbingan (Sb) Madrasatul Al-Mahmudiah Kuala Lumpur Malaysia. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 55-60. univpancasila.ac.id
- Yuspin, W., Azhari, A. F., Wardiono, K., Zuhdi, S., Kurnianingsih, M., & Marjanah, I. D. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong: Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection for Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 95-104. umpr.ac.id
- Jannah, M., Kurniaty, Y., Hakim, H. A., & Basri, B. (2024). Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(3), 119-128. unimma.ac.id
- Lokahita, P. D., Kawarizmi, I. G., Adriana, A. S., Wahyudin, Y. A., & Husni, V. (2024). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Melalui Sosialisasi Migrasi Aman. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 6(1), 137-148. unram.ac.id
- Rohman, R. H., Prastyo, D., Hidayat, A. I., Mahmud, R. S., Syahririni, S., Rahmaniati, R., & Zannah, F. (2023). Implementasi program pendidikan bagi anak-anak WNI di ICC Ladang Kosma Malaysia. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 237-252. ums.ac.id
- Adnantara, K. F. (2024). Peranan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan Hukum. *Jurnal Hukum Saraswati*. unmas.ac.id
- Nandaklana, G. D. (2024). Peran Lsm “keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi)” dalam Melakukan Advokasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi uii.ac.id

